

Policy Brief

EDISI 1

ASEAN DITERPA KRISIS GANDA: KTT ASEAN 2023 HARUS HADIRKAN KEBIJAKAN BARU!

Penulis:

Muhammad Rum
Randy W. Nandyatama
Yulida N. Santoso
Tunggul Wicaksono

Penyunting:

Poppy S. Winanti

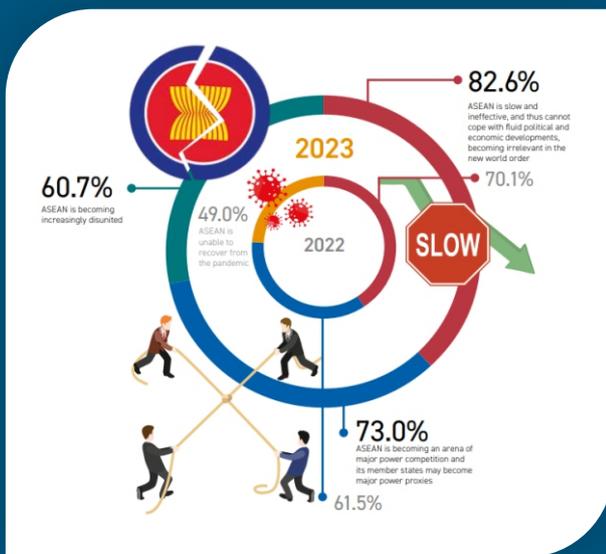
Tata Letak:

Munawar W. Sugiyarto

Sumber gambar sampul:
<https://setkab.go.id/en/asean-summit-asean-must-be-ready-to-face-more-complex-challenges-president-jokowi-says/>

Tahun 2023 menjadi tahun yang penting dalam hubungan luar negeri Indonesia di kawasan Asia Tenggara, terutama sebagai ketua ASEAN. KTT ASEAN ke-42 yang baru saja diselenggarakan di Labuan Bajo 10-11 Mei 2023 menjadi sorotan karena ekspektasi yang besar dari komunitas internasional terhadap ASEAN dalam menghadapi berbagai krisis dan tantangan dewasa ini. Jelas ada kegentingan untuk memahami tantangan yang ada di depan mata dan merumuskan cara agar Indonesia dapat menuntaskan tahun keketuaan ini dengan sukses dan gemilang. Kertas kebijakan ini bertujuan untuk memetakan tantangan yang perlu segera mendapat respons dalam periode keketuaan Indonesia ini.

Harus diakui, ASEAN tengah menghadapi krisis ganda. Krisis pertama terkait dengan situasi dunia yang semakin tidak stabil dengan meningkatnya tensi rivalitas kekuatan-kekuatan besar, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok. ASEAN yang selama ini menjadi forum utama komunikasi antarkekuatan di kawasan mulai menghadapi krisis legitimasi dengan munculnya tren preferensi kekuatan-kekuatan besar yang menggunakan forum-forum kerja sama lain. Krisis kedua terkait dengan menurunnya legitimasi ASEAN karena kecenderungan lambannya respons regional atas krisis di kawasan, seperti dalam merespons COVID-19 dan krisis Myanmar. Kepemimpinan Indonesia dirasakan penting dalam mendorong skema-skema regional yang lebih responsif. Hal ini membuat keketuaan Indonesia dalam ASEAN saat ini menjadi sangat krusial.



Krisis legitimasi dan efektivitas yang tengah dihadapi ASEAN tersebut juga tercermin dari pandangan masyarakat yang terekam dalam jajak pendapat. Dalam hasil survei yang diterbitkan oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute pada Februari 2023, ditemukan indikator-indikator yang mengkhawatirkan, di antaranya; 82,6% responden asal Asia Tenggara menganggap bahwa ASEAN terlalu lambat dan tidak efisien dalam menanggapi perkembangan politik dan ekonomi dunia yang oleh masyarakat dinilai sangat cair; 73% responden berpandangan

bahwa ASEAN telah menjadi arena perebutan pengaruh kekuatan-kekuatan besar dunia; 60,7% meyakini bahwa ASEAN semakin hari semakin terbelah posisinya; dan, 37,2% responden khawatir bahwa ASEAN tidak akan mampu pulih sepenuhnya dari pandemi (ISEAS, 2023). institusi organisasi regional dengan mekanisme dan prinsip-prinsip baru yang responsif dan partisipatif.

Indikator-indikator tersebut menunjukkan adanya keraguan yang besar dari masyarakat Asia Tenggara terhadap performa organisasi regional. Keraguan ini mengindikasikan adanya perbedaan aspirasi antara elit pemerintahan dengan masyarakat. ASEAN harus mampu memodernisasi institusinya agar lebih responsif dengan aspirasi masyarakat luas demi mengatasi krisis legitimasi dan *democratic gap*. Prinsip yang dimandatkan oleh ASEAN Charter yaitu menjadi organisasi regional yang *rules-based*, *people-oriented*, dan *people-centred* harus bermuara pada praktik-praktik baru pelibatan masyarakat sipil yang lebih partisipatif.

Selama sejarah, kepemimpinan Indonesia sangatlah memengaruhi desain dan arah tata kelola ASEAN dalam menghadapi tantangan di masanya. Untuk itu, Fisipol UGM mengidentifikasi adanya empat isu mendesak yang perlu didorong Indonesia dalam diskusi-diskusi di ASEAN, yaitu 1) persoalan delegitimasi ASEAN dalam merespons krisis global, 2) pentingnya pemberdayaan ASEAN sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan, 3) ASEAN harus mampu mendemonstrasikan bahwa prinsip-prinsip organisasi masih relevan dengan perkembangan norma internasional, dan 4) urgensi bagi ASEAN untuk memodernisasi institusi organisasi regional dengan mekanisme dan prinsip-prinsip baru yang responsif dan partisipatif.

Semangat dari rekomendasi kebijakan ini adalah ajakan bagi ASEAN untuk memikirkan kembali prinsip-prinsip regionalisme dalam menjawab tantangan kontemporer. Di samping itu, ASEAN harus mampu hadir dalam kerja-kerja praktis yang langsung bersentuhan dengan kepentingan dan keselamatan masyarakat Asia Tenggara. Seperti misalnya dalam menghadapi pandemi, kebakaran hutan, perdagangan manusia, keamanan perairan, dan lain sebagainya. Keempat isu tersebut akan membantu ASEAN keluar dari krisis legitimasi dan efektivitas yang dihadapi saat ini.



1. Delegitimasi ASEAN dalam merespons krisis global

Di satu sisi, dunia menjadi semakin kompleks dengan perkembangan perubahan iklim, terganggunya rantai pasokan pangan, transisi energi, keamanan siber, sistem kesehatan dunia dan meningkatnya potensi inflasi (Global Risks Report, 2023). Semua potensi ini seringkali saling berkelindan. Di sisi lain, kekuatan dunia juga menjadi semakin terpolarisasi dengan adu kekuatan antara Washington and Beijing yang semakin ketat. Belum lagi persoalan-persoalan di ranah domestik para negara anggota ASEAN yang menimbulkan pertanyaan atas legitimasi ASEAN untuk menjadi pemimpin, baik bagi dirinya sendiri, di kawasan, dan di dunia.

Tema keketuaan yang dirumuskan oleh Indonesia menjelaskan keinginan untuk menjadikan ASEAN sebagai beberapa hal, yakni sebagai jangkar kestabilan bagi dunia di tengah kompleksitas perkembangan global sehingga ASEAN perlu menghindarkan diri dari menjadi proksi bagi kekuatan-kekuatan besar, menciptakan perdamaian internal bagi sesama anggotanya dan memperkuat sentralitasnya (ASEAN Indonesia 2023, 2023).

Oleh karena itu, ASEAN perlu menegaskan beberapa hal berikut jika ingin menunjukkan kapasitasnya sebagai aktor yang berkapasitas di kawasan Asia Tenggara (*agency*) dan menandingi perdebatan tentang kaburnya posisi ASEAN. *Pertama*, ASEAN perlu lebih berani dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang memiliki keberpihakan yang jelas. Keberpihakan yang jelas dapat merujuk pada prioritas strategis bersama, hukum internasional, mekanisme, atau permasalahan fundamental bagi ASEAN. Sebagai konsekuensi dari hal ini, ASEAN harus menghadapi dan menanggapi isu-isu yang sensitif seperti berkembangnya mini-lateralisme AUKUS (pakta keamanan trilateral antara Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat) dan QUAD (Quadilateral Security Dialog, forum keamanan strategis antara Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat). *Kedua*, mengingat posisi kawasan ASEAN yang strategis, ASEAN perlu menguatkan pendekatan *trust-building* dalam hubungan-hubungan diplomatiknya. Ini membutuhkan semua pihak untuk membangun kedekatan dengan sesama negara ASEAN, mitra dialog, tidak terkecuali Cina dan Amerika Serikat. Para pemimpin perlu menciptakan kondisi di mana kepercayaan dapat tumbuh sehingga dialog yang berjalan dapat bertransformasi menjadi kebijakan yang responsif dan tepat guna.

2. Pemberdayagunaan ASEAN sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan



Keketuaan Indonesia di ASEAN menjadi momentum yang tepat untuk mengejawantahkan kerangka kerjasama berkelanjutan, dengan intensi yang kuat untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan dan dunia. Saat ini, ASEAN tengah bangkit dari keterpurukan pasca pandemi melalui jalan integrasi pasar di kawasan dengan cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN. Namun demikian, tantangan-tantangan di masa depan sebagai dampak rambatan dari perekonomian global perlu direspons sedini mungkin. Di tengah instabilitas makroekonomi dan perdagangan dunia, perumusan kebijakan yang tepat guna perlu diakselerasi untuk melindungi kawasan dari disrupsi eksternal dan konsekuensi yang tidak sejalan dengan prinsip ekonomi berkelanjutan.

ASEAN sebagai *Epicentrum of Growth* memiliki dorongan strategis berupa pemulihan dan pembangunan kembali, ekonomi digital, dan keberlanjutan. Sejalan dengan target prioritas tersebut, terdapat urgensi bagi ASEAN untuk mengukuhkan kembali posisinya sebagai pionir dari kekuatan ekonomi kawasan yang tidak hanya inklusif, tetapi juga tepat sasaran dan berdaya guna. Poin ini penting sebagai upaya memperkuat kapasitas organisasi dan bertahan dari berbagai risiko yang mengancam perekonomian regional.

Keperluan untuk mendefinisikan agenda *Epicentrum of Growth* dengan kepentingan regional dalam transformasi menuju ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan diharapkan mampu menjawab persoalan keterjebakan negara-negara ASEAN dalam *middle-income trap* yang telah dialami dalam beberapa dekade ini. Beberapa kalangan menilai bahwa tertahannya beberapa negara ASEAN dalam situasi jebakan kelas pendapatan menengah disebabkan oleh perlambatan laju pertumbuhan ekonomi seperti kajian mengenai kecenderungan perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia dalam proyeksi 2028 (Bangkok Post, 2019). Kondisi tersebut masih harus dihadapi dalam beberapa waktu ke depan. Thailand memasang target untuk dapat keluar dari *middle-income trap* pada 2037 (Bangkok Post, 2023). Thailand sendiri masuk dalam jajaran negara berpendapatan menengah pertama kali pada tahun 1976 (Felipe, 2015 dalam Anggareni, 2016). Artinya, apabila rancangan tersebut pada akhirnya berhasil, negara seperti Thailand memerlukan waktu lebih dari 6 (enam) dekade (61 tahun) sejak Thailand pertama kali masuk dalam jajaran negara berpendapatan menengah. Apabila program dan proyeksinya meleset, maka keadaan ini akan berlangsung lebih lama lagi dengan negara-negara ASEAN berada dalam posisi bawah dari rantai produksi dan rantai nilai global. Untuk mengatasi *middle-income trap* diperlukan solidaritas dan kebijakan bersama ASEAN yang tepat untuk elevasi posisi tersebut.

Fokus agenda yang perlu diinisiasi oleh ASEAN yang pertama adalah menyadari dan mampu mengidentifikasi bahwa negara-negara anggota memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang berbeda sehingga menimbulkan disparitas yang kemudian memengaruhi ketahanan ekonomi secara kolektif di kawasan. Hal ini berkaitan langsung dengan penanganan pascapandemi yang belum bisa diimplementasikan secara kolektif dalam kerangka kerja sama strategis. Padahal, masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap ASEAN untuk bisa merepresentasikan dirinya sebagai organisasi regional yang kuat dan tahan banting. Seringkali, para perumus kebijakan bersikap reaktif terhadap penanggulangan krisis sehingga kehilangan strategi daya guna jangka panjang. Apabila ASEAN menghadapi krisis serupa di masa depan, strategi yang dapat ditempuh adalah penyediaan pengaman sosial, pembentukan Satuan Kerja yang fokus menangani satu isu berdasarkan keahlian, serta memperkuat agenda kerjasama dengan pemangku kepentingan yang relevan.

Fokus agenda kedua adalah membumikan sistem ekonomi digital. Di era interoperabilitas lintas batas, konektivitas pembayaran di kawasan perlu dicanangkan sebagai inisiatif yang bisa diterima oleh masyarakat luas sebagai cara untuk memperkuat ketahanan keuangan. Penguatan laju interkoneksi sistem pembayaran digital di kawasan perlu ditunjang pula oleh penjaminan keamanan siber, pengadopsian standar internasional, serta evaluasi berjangka secara kolaboratif.

Fokus agenda ketiga berkaitan dengan jalinan ekonomi ASEAN yang masih bergantung pada rantai pasok dan investasi dari luar. Hal ini mendemonstrasikan rentannya kawasan terhadap krisis dan kurangnya inisiatif ASEAN untuk bisa mengidentifikasi potensi sektor yang bisa memperkuat perekonomian seperti pariwisata, sumber daya laut, dan energi baru terbarukan. Peralihan menuju *green economy* dan/atau *blue economy* juga bisa menjadi alternatif kebijakan yang berorientasi pada ekonomi sirkular. Diharapkan, melalui pondasi kebijakan yang ajeg dan berlaku jangka panjang, diversifikasi dan ketahanan ekonomi ASEAN bisa direalisasikan secara tepat guna.

3. ASEAN harus mampu mendemonstrasikan bahwa prinsip-prinsip organisasi masih relevan dengan perkembangan norma internasional

Tahun ini menjadi tahun ujian bagi ASEAN dalam merespons hambatan-hambatan pembangunan politik dan demokrasi di kawasan. Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute, kekhawatiran terhadap instabilitas politik domestik selalu mewarnai daftar ketakutan warga Asia Tenggara. Pada tahun 2022, 34,3% responden menyatakan instabilitas politik domestik menjadi salah satu kekhawatiran terbesar. Sedangkan pada 2023, terjadi kenaikan angka menjadi 35,6%. Apabila ditelisik dalam data per negara, penyumbang terbesar jumlah mereka yang khawatir pada instabilitas domestik adalah di Myanmar, yaitu 58% pada 2022 dan 51,3% pada tahun 2023 (ISEAS, 2023). Kita dapat memahami tren ini berhubungan dengan kudeta dan krisis politik sejak 2021.

Kudeta militer yang terjadi pada Februari 2021 di Myanmar menandai kemunduran pembangunan politik dan demokrasi yang sudah susah payah diupayakan berbagai pihak termasuk keterlibatan aktif ASEAN dalam upaya demokratisasi di Myanmar. Pada April 2021, ASEAN telah menyelenggarakan pertemuan para pemimpin negara untuk mendiskusikan mekanisme regional untuk merespons krisis di Myanmar dan melahirkan konsensus lima poin yang mengamanatkan penghentian kekerasan; dialog semua pihak; penunjukan utusan khusus; mengizinkan bantuan kemanusiaan; dan, mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk dapat berjumpa semua pihak (ASEAN Secretariat, 2021).

Sehingga lebih dari dua tahun sampai hari ini, konsensus lima poin tersebut belum bisa terlaksana akibat keengganan junta militer. Akibat belum dilaksanakannya konsensus lima poin, pemimpin pemerintahan militer Myanmar tidak diundang dalam KTT ASEAN di Labuan Bajo pada 10-11 Mei yang lalu. Akan tetapi, terjadi ketidakpaduan pandangan, karena beberapa pemimpin ASEAN sebetulnya ada yang menghendaki pemimpin militer Myanmar untuk tetap diundang dalam KTT (Zalilan, 2023).

Terkait dengan permasalahan yang muncul akibat krisis politik domestik, kemunduran demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang terjadi di Myanmar, efektivitas ASEAN dalam merespons isu tersebut terkendala oleh interpretasi yang kaku terhadap prinsip *non-interference*. Di awal krisis politik Myanmar, para pemimpin Thailand, Kamboja, Filipina, Laos, dan Vietnam enggan untuk memberikan komentar dan tekanan (Tempo, 2021). Padahal, kita dapat menelusuri dan menemukan peran aktif ASEAN dalam membantu pembangunan politik dan demokrasi di Myanmar. Sejak bergabung pada 1997, perhatian khusus diberikan kepada upaya-upaya adopsi dan transisi menuju demokrasi di Myanmar.



Krisis politik dan pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi dan diperparah dengan pembangunan ekonomi yang belum optimal serta terjadinya bencana alam. Beberapa krisis politik dan pelanggaran HAM di dalam negeri Myanmar telah ditanggapi oleh ASEAN dengan berbagai kebijakan regional, misalnya saja pada tahun 2006 telah menanggukuhkan keketuaan Myanmar di ASEAN (New York Times, 2005) dan pada East-Asia Summit November 2007 di mana para pemimpin ASEAN mengizinkan adanya santiaji terhadap krisis demokrasi dan pelanggaran HAM di Myanmar dari utusan khusus PBB Ibrahim Gambari (Haacke, 2008). ASEAN terlibat aktif bersama PBB dalam menanggapi bencana siklon Nargis pada 2008 dan diteruskan pendampingan terhadap *roadmap to democracy* yang membantu mempersiapkan diselenggarakannya pemilihan umum secara demokratis pada 2011 dan kembalinya pemerintahan sipil (Reuters, 2011). Artinya, interpretasi terhadap prinsip-prinsip ASEAN Way yaitu konsultasi, konsensus, dan *non-interference* semestinya dapat dilakukan secara dinamis sesuai dengan perkembangan prinsip-prinsip kemanusiaan, norma internasional, dan nilai-nilai universal.

Dalam semangat melakukan reinterpretasi terhadap ASEAN Way yang lebih dinamis tersebut, beberapa langkah dapat diinisiasikan. Reinterpretasi ASEAN Way terutama mengenai prinsip *non-interference* dapat dilakukan dengan menyetengahkan kembali diskursus atas redefinisi ASEAN Way yang lebih responsif terhadap prinsip-prinsip norma internasional yang berkembang. ASEAN dapat menghadirkan kembali eksplorasi dan perdebatan mengenai model-model interpretasi ASEAN Way alternatif. Perdebatan untuk mengadaptasi norma-norma internasional baru pernah digulirkan sebelumnya seperti konsep "*flexible engagement*" dan "*enhanced interaction*" yang pernah diwacanakan baik oleh Anwar Ibrahim dan Surin Pitsuwan di periode-periode sebelumnya (Haacke, 1999; Katanyuu, 2006), juga interpretasi Surin Pitsuwan atas aplikasi *responsibility to protect* misalnya pada kasus keterlibatan ASEAN untuk membantu upaya tanggap bencana siklon Nargis di Myanmar (Rum, 2020). Keketuaan Indonesia dapat berupaya untuk mendorong suatu inisiasi yang diskursif dan implementatif untuk diterapkan pada beberapa krisis politik yang dapat menjadi proses sosialisasi dan memungkinkan dilakukannya adaptasi oleh anggota-anggota yang lain. Akhirnya, klaim ASEAN Matters juga perlu dibuktikan lebih lanjut di level global. ASEAN dapat meningkatkan kontribusinya dalam politik internasional dan perdamaian dunia dengan memperkuat peran "*middlepowership*" yaitu aktif dalam menjadi promotor nilai-nilai universal, mempromosikan forum-forum dialog, mendorong norma-norma internasional baru dan kapitalisasi untuk kepentingan masyarakat internasional. Yaitu, memiliki resonansi dengan kepentingan masyarakat global, dan bukan hanya kepentingan kawasan semata.

4. Urgensi bagi ASEAN untuk memodernisasi institusi organisasi regional dengan mekanisme dan prinsip-prinsip baru yang responsif dan partisipatif

Harus disadari bahwa salah satu penyebab lambatnya ASEAN dalam merespons krisis adalah desain institusi yang terbatas. Sebagian besar mekanisme organisasi regional berlandaskan pada prinsip-prinsip yang tertera dalam ASEAN Charter, berbagai cetak biru keputusan kawasan, dan kerangka acuan kerja (*terms of reference*) berbagai organ turunan ASEAN. Mekanisme dan prinsip-prinsip tersebut pastinya relevan pada masanya. Namun, dalam rangka pengembangan institusi ASEAN yang relevan dan responsif dengan tantangan zaman, perlu dilakukan peninjauan terhadap tata kelola organisasi dan pengambilan kebijakan di kawasan yang dapat dijadikan basis visi ASEAN pasca 2025 dan juga review terhadap ASEAN Charter. Beberapa area yang dapat ditingkatkan di antaranya:

Perlunya revitalisasi institusi ASEAN pasca 2025. Salah satu isu krusial adalah apakah tiga pilar komunitas ASEAN masih relevan untuk dipertahankan atau justru berpotensi memunculkan *silo mentality* (kompartementalisasi dalam kerja sama) (Nandyatama dan Rum, 2020).

Konsep perluasan pilar awalnya sangat membantu ASEAN menspesifikasikan koordinasi variasi isu-isu yang ada. Namun kenyataannya, kompartementalisasi mekanisme ASEAN memberikan hambatan terhadap perkembangan isu-isu yang sifatnya lintas sektoral, seperti bisnis dan hak asasi manusia, perubahan iklim, berbagai krisis seperti pangan dan pandemi, serta demokratisasi di kawasan. Sedangkan di sisi lain, terdapat tuntutan agar ASEAN memiliki legitimasi dalam penanganan krisis bersama.



Perlunya mekanisme yang mendorong diskusi dan penyelesaian masalah jangka panjang ASEAN. Hampir setiap keketuaan ASEAN, *deliverables* dipilih dan ditawarkan dengan prinsip mengutamakan *low hanging fruits* (mencari target cepat). Hal ini karena keterbatasan waktu dan para politisi yang memegang pemerintahan ingin ada bukti program tercapai dalam satu tahun keketuaan. Ini menjadikan inisiatif-inisiatif yang lebih ambisius dan memerlukan diskusi jangka panjang seperti *climate justice* dan demokratisasi kawasan tidak pernah jadi pilihan program keketuaan. Usulan model troika dalam keketuaan ASEAN serta reformasi penganggaran badan-badan ASEAN yang bertugas untuk mensuplai usulan kebijakan mungkin dapat dipertimbangkan agar dapat mengakomodasi penyelesaian masalah jangka panjang yang lebih baik dan target capaian yang lebih ambisius.

Hal terakhir yang tak kalah pentingnya dalam menjamin proses modernisasi institusi ASEAN adalah perlunya mendorong terwujudnya *people-oriented* ASEAN demi menjamin keberlanjutan proyek regionalisme yang dimiliki oleh semua warga di kawasan. Selama ini, telah banyak upaya masyarakat sipil berinteraksi dan mengadvokasi berbagai isu ke ASEAN. Namun, banyak dari upaya interaksi mereka terbentur desain institusi regional yang memberi akses yang terbatas (Gerard, 2014; Nandyatama, 2021). Oleh karenanya, Indonesia sebagai salah satu negara demokratis di kawasan diharapkan dapat menjadi teladan bagi ASEAN, baik sebagai organisasi regional maupun negara-negara anggotanya, perlu terbiasa berinteraksi dengan perwakilan masyarakat sipil dan merumuskan kebijakan yang partisipatif.

Referensi

- Anggraeni, E. R. (2016). "Are ASEAN Countries Involved in Middle Income Trap?" Lesson Learned from Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam and Philippines. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*,4(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/2604/2360>
- ASEAN Indonesia 2023. (2023). ASEAN Matters. National Committee of Indonesia's Chairmanship in ASEAN. <https://asean2023.id/en/page/asean-2023/asean-matters>
- ASEAN Secretariat. (2021). Chairman's Statement on the ASEAN Leaders' Meeting 24 April 2021. Diakses pada 17 Mei 2023 <https://asean.org/wp-content/uploads/Chairmans-Statement-on-ALM-Five-Point-Consensus-24-April-2021-FINAL-a-1.pdf>
- Bangkok Post. (2019). Avoiding the Middle-Income Trap. 25 September. Diakses pada 16 Mei. 2023. <https://www.bangkokpost.com/business/1757919/avoiding-the-middle-income-trap>
- Bangkok Post. (2023). Moving Thailand out of the 'middle-income trap' 10 Januari. Diakses pada 16 Mei 2023. <https://www.bangkokpost.com/thailand/pr/2479422/moving-thailand-out-of-the-middle-income-trap>
- Gerard, K. (2014). ASEAN's Engagement of Civil Society: Regulating Dissent. Palgrave Macmillan.
- Haacke, J. (1999). The Concept of Flexible Engagement and the Practice of Enhanced Interaction: Intramural Challenges to the 'ASEAN Way', *The Pacific Review*, 12:4, 581-611, <https://doi.org/10.1080/09512749908719307>
- Haacke, J. (2008). ASEAN and Political Change in Myanmar: Towards a Regional Initiative? *Contemporary Southeast Asia*, 30(3), 351–378. <http://www.jstor.org/stable/41220519>
- ISEAS-Yusof Ishak Institute. (2023). The State of Southeast Asia Report: 2023 Survey Report. ASEAN Studies Centre at the ISEAS-Yusof Ishak Institute. <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/state-of-southeast-asia-survey/the-state-of-southeast-asia-2023-survey-report-2/>
- Katanyuu, R. (2006). Beyond non-interference in ASEAN: the association's role in Myanmar's national reconciliation and democratization. *Asian Survey*, 46(6), 825-845. <https://doi.org/10.1525/as.2006.46.6.825>
- Nandyatama, R. (2021). Indonesian Civil Society and Human Rights Advocacy in ASEAN: Power and Normative Struggles. Palgrave Macmillan
- Nandyatama, R., Rum, M. (2020). Is ASEAN doing enough to address business and human rights?. *Melbourne Asia Review*, 2020(3). DOI: [10.37839/MAR2652-550X3.7](https://doi.org/10.37839/MAR2652-550X3.7).
- New York Times. (2005). Myanmar Gives Up 2006 ASEAN Chairmanship. 26 Juli. Diakses pada 16 Mei 2023. <https://www.nytimes.com/2005/07/26/world/asia/myanmar-gives-up-2006-asean-chairmanship.html>



- Reuters. (2011). ASEAN to Push Myanmar on Democracy, Wants Sanctions Lifted. 16 Januari. Diakses pada 17 Mei 2023 <https://www.reuters.com/article/us-asean-idUSTRE70F0D320110116>
- Rum, M. (2020). The State of Responsibility to Protect Inception in ASEAN Regionalism. *The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 3(1), 143-155. <https://doi.org/10.22146/ikat.v3i2.50317>
- Tempo. (2021). ASEAN Terjebak Kudeta Militer Myanmar. 9 Februari. Diakses pada 17 Mei 2023. <https://fokus.tempo.co/read/1431226/asean-terjebak-kudeta-militer-myanmar>
- World Economic Forum. (2023). *The Global Risks Report 2023 18th Edition Insight Report* (pp. 1–98). World Economic Forum.
- Zalilan, T. (2023). Lack of Progress in Myanmar Crisis Straining ASEAN Unity, But 5-Point Peace Plan Still Best Option: Analysts. *Today Online*, 15 Mei. Diakses pada 17 Mei <https://www.todayonline.com/singapore/lack-progress-myanmar-crisis-straining-asean-unity-5-point-peace-plan-still-best-option-analysts-2171391>

